

SKRIPSI

**POLARISASI POLITIK DESA TRANSMIGRAN
(Studi Perbandingan Dua Desa di Kabupaten Luwu Utara)**

Diajukan sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program Prodi Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



OLEH :

MUH. FARIQ AKBAR

E041191065

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi

**POLARISASI POLITIK DESA TRANSMIGRAN
(Studi Perbandingan Dua Desa di Kabupaten Luwu Utara)**

Yang Diajukan Oleh :

MUH. FARIQ AKBAR

E041191065

Dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi

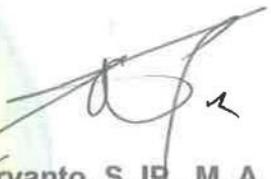
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

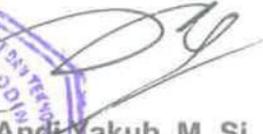

Drs. Andi Yakub, M. Si., Ph. D.
NIP. 19621231 199003 1 023


Haryanto, S. IP., M. A.
NIP. 19861008 201903 1 009

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik




Drs. Andi Yakub, M. Si., Ph. D.
NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

POLARISASI POLITIK DESA TRANSMIGRAN

(Studi Perbandingan Dua Desa di Kabupaten Luwu Utara)

Yang diajukan oleh :

MUH. FARIQ AKBAR

E041191065

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi Program

Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Drs. Andi Yakub, M. Si., Ph. D (.....)

Sekretaris : Haryanto, S. IP., M. A. (.....)

Anggota : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si (.....)

Anggota : Andi Naharuddin, S.IP., M.Si. (.....)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. FARIQ AKBAR

NIM : E041191065

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“POLARISASI POLITIK DESA TRANSMIGRAN (Studi Perbandingan Dua Desa di Kabupaten Luwu Utara)”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Januari 2024



MUH. FARIQ AKBAR

ABSTRAK

MUH. FARIQ AKBAR – E041191065. Polarisasi Politik Desa Transmigran (Studi Perbandingan Dua Desa di Kabupaten Luwu Utara). Di bawah bimbingan Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D. sebagai pembimbing utama dan Haryanto, S.IP., M.A. sebagai pembimbing pendamping.

Tulisan ini mengkaji tentang polarisasi politik dalam studi perbandingan di dua Desa Transmigran di Kabupaten Luwu Utara. Polarisasi merupakan sebuah keterbelahan masyarakat dalam melihat sebuah perbedaan yang menyebabkan terpecahnya masyarakat ke dua sisi yang berbeda. Dalam negara demokrasi, studi menunjukkan polarisasi menjadi tren yang belakangan ini meningkat secara tajam. Di Indonesia sendiri, polarisasi menjadi sebuah hal yang tak terhindarkan, dengan latar belakang masyarakat multikultur, pergesekan identitas dalam proses demokrasi rentan terhadap polarisasi. Studi ini hadir untuk melihat polarisasi politik jauh kedalam lingkup desa yang tak terlepas dari proses demokrasi melalui pemilihan kepala desa dan berlanjut ke tata kelola pemerintahan desa dengan membandingkan dua desa transmigran yang memiliki latar belakang berbeda untuk mendapat bukti yang lebih detail terhadap polarisasi politik.

Penelitian ini menggunakan metode komparatif kualitatif untuk menggambarkan polarisasi politik yang ada di Desa Kalotok dan Desa Tulung Sari, menggunakan konsep polarisasi politik dengan pengukuran polarisasi afektif dan ideologis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara terhadap beberapa informan yang terkait dengan penelitian, serta melakukan observasi terjun langsung ke lokasi penelitian dan menggunakan studi kepustakaan sebagai data sekunder.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa polarisasi politik yang terjadi di kedua desa transmigran menunjukkan dinamika yang berbeda. Desa Kalotok yang sedari awal masyarakatnya mengalami keterbelahan sosial akibat perang antar etnis di masa lampau, kembali dimobilisasi oleh oposisi untuk mendapatkan dukungan dalam proses elektoral desa. Sedangkan di Desa Tulung Sari, para elit desa membentuk polarisasi baru yang tajam dengan sentimen etnis untuk menguatkan dukungan dan menjatuhkan lawannya. Polarisasi berlanjut menembus jauh hingga pada tata kelola pemerintahan di kedua desa, mempengaruhi proses pengambilan kebijakan dan alokasi anggaran. membentuk politik "kita vs mereka" dalam prosesnya.

Kata Kunci : Polarisasi, Demokrasi, Transmigran, Politik Desa.

ABSTRACT

MUH. FARIQ AKBAR – E041191065. *Political Polarization of Transmigrant Villages (Comparative Study of Two Villages in North Luwu Regency). Under the guidance of Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D. as the main supervisor and Haryanto, S.IP., M.A. as the co-supervisor.*

This paper examines political polarization in a comparative study of two Transmigrant Villages in North Luwu Regency. Polarization is a division of society in seeing a difference that causes the split of society into two different sides. In democracies, studies show that polarization is a trend that has recently increased sharply. In Indonesia itself, polarization is inevitable, with a multicultural society, identity friction in the democratic process is prone to polarization. This study aims to look at political polarization deep into the village sphere, which is inseparable from the democratic process through village head elections and continues to village governance by comparing two transmigrant villages with different backgrounds to obtain more detailed evidence of political polarization.

This research uses a qualitative comparative method to describe the political polarization that exists in Kalotok Village and Tulung Sari Village, using the concept of political polarization with affective and ideological polarization measurements. The data collection techniques used were interviews with several informants related to the research, as well as direct observation to the research location and using literature studies as secondary data.

The results illustrate that the political polarization that occurred in the two transmigrant villages showed different dynamics. Kalotok Village, where the community has experienced social division due to past inter-ethnic wars, was again mobilized by the opposition to gain support in the village electoral process. Meanwhile, in Tulung Sari Village, village elites formed a sharp new polarization with ethnic sentiments to strengthen support and bring down their opponents. Polarization continues to penetrate deep into governance in both villages, influencing the policy-making process and budget allocations, shaping "us vs. them" politics in the process.

Keywords: Polarization, Democracy, Transmigrants, Village Politics.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, sang Ilahi atas segala berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Polarisasi Politik Desa Transmigran (Studi Perbandingan Dua Desa di Kabupaten Luwu Utara)”. Tak lupa juga, penulis haturkan shalawat serta salam kepada baginda sang kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP).

Pertama-tama Skripsi ini saya hantarkan dan persembahkan untuk dua orang spesial nan mengagumkan karena telah menghadirkan saya di dunia yang penuh dengan keindahan ini dan selalu menjadi setiap hembus dari setiap tarikan nafas, kepada **(Alm) Ir. Syamsul Anwar dan Sri Hastuti**, Kedua orang tua yang sangat cintai dengan penuh hati, dengan penuh ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas segala hal-hal baik yang selalu kalian ucapkan, hadirkan, dan usahakan di setiap langkah perjalanan hidup anakmu. Meskipun tak selamanya hidup selalu seperti yang kita rencanakan, namun hal -hal itulah yang menguatkan dan menyalakan asa, sebab "api mana lagi yang akan terang-benderang jika tak berada dikegelapan". Atas semua yang pernah kita lalui dikehidupan

keluarga kecil ini, semoga kita tetap saling memaafkan dan mengasihi satu sama lain.

Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Jufri dan Ibu Farida, tante saya yang tercinta dan beserta keluarga, Kak Firda, Kak Rani, dan Adel, yang telah menerima saya sebagai bagian dari keluarga kalian dan selalu mendukung saya untuk terus bisa berjuang mencapai segala cita-cita. Begitu besar hati kalian menerima saya dan memberi kepercayaan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tak terhingga jasa kalian dalam hidup saya yang sama sekali tidak bisa saya balas hanya selain dengan rasa bangga ketika melihat saya berjuang atas harapan kalian semua. Semoga segala kebaikan mengahampiri hidup kita.

Dan tak lupa juga, terima kasih sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Bapak Drs. H. Yakub, M.Si.,ph.D. dan Bapak Haryanto, S.IP., M.A. yang telah dengan sungguh dan ikhlas membimbing penulis menulis skripsi ini dari awal proposal hingga akhir penulisan.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat dan sukacita, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak **Dr. Phil sukri, S.IP., M.Si.**, sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah memberi

penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

2. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan kemahasiswaan, Ibu **Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.**, beserta segenap jajaran staf.
3. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak **Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si.**, beserta segenap jajaran staf.
4. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak **Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si.** beserta segenap jajaran staf.
5. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak **Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.**, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik dan sekaligus dosen pembimbing saya.
6. Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik : Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.**, Alm. Bapak **Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag.**, Bapak **Dr. Muhammad Saad, M.A.**, Ibu **Dr. Ariana, S.IP., M.si.**, Ibu **Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.**, Ibu **Dr. Gustiana A Kambo, M.Si.**, Bapak **Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.**, Ibu **Endang Sari, S.IP., M.Si.**, Bapak **Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.**, Ibu **Umni Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.**, Bapak **Prof. Dr. Muhammad M.Si.**, Bapak **Haryanto, S.IP., M.A.**, Bapak **Zulhajar, S.IP., M.A.**, dan Ibu **Dian**

Ekawaty, S.IP., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.

7. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak **Syamsuddin, S.T.**, dan Ibu **Musriati S.E.**, yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi departemen Ilmu Politik.
8. Kepala Desa Kalotok, Bapak **Drs. Jusman** dan seluruh jajarannya dan Kepala Desa Tulung Sari, Bapak **Sugiarto** dan seluruh jajarannya yang telah membantu saya dan menerima saya dengan baik saat melakukan penelitian serta meluangkan waktunya untuk menjadi informan penelitian ini. Semoga selalu diberikan kesehatan yang melimpah
9. Seluruh keluarga besar **H. Mustamin dan Hj. Pariati** dan keluarga besar **H. Silas Sianto dan Hj. Maryam** yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu karena telah memberi dukungan dan doa dalam meraih gelar sarjana saya. Sehat-sehat ki semua, Na maballo nasan ki ke sitammu mangka.
10. Kepada Pak ketua **Bisma Naufal Yaesar**, atas segala support dan semangat-nya yang begitu besar selama berkehidupan di dunia **BIRU KUNING**. Begitu banyak proses dan dinamika yang dilalui membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. selama satu periode di **HIMAPOL FISIP UNHAS**, suatu kesempatan berharga pernah memimpin sebagai **KETUA - WAKIL KETUA HIMAPOL**

FISIP UNHAS 2021-2022. Semoga segala hal baik selalu mempertemukan kita, serta menjadi wakil rakyat yang amanah dan progresif kedepannya **PAK DEWAN.**

11. Seluruh **BADAN PENGURUS HIMAPOL FISIP UNHAS PERIODE 2021-2022 dan KELUARGA BESAR HIMAPOL FISIP UNHAS,** yang penuh dengan suka-duka melewati dinamika keorganisasian. Saya sebagai Wakil Ketua Periode 2021-2022 mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas segala kerja keras selama periode kepengurusan. Suatu kebanggaan pernah bekerja bersama, sehat-sehat ki semua dan semoga dilancarkan semua perjalanan hidupnya.
12. Seluruh teman-teman **DIPLOMASI 2019** yang telah selalu kebersamai dari awal perkuliahan hingga akhir, begitu banyak hal yang kita lalui menjadi sebuah memori manis yang masing-masing kita simpan sebagai pengingat bahwa kita pernah ada. **DIPLOMASI** kalau jadi series di netflix mungkin bisa sampai season 5, karena banyak sekali hal-hal yang perlu diceritakan. Terima kasih karena "ada" dan menjadi warna, semoga kalian semua sehat-sehat, doaku selalu mengiringi langkah kalian dan semoga suatu saat kita bisa bertemu kembali.
13. Kepada Kakanda Pak Direktur IIC sekaligus senior saya tecinta, **Akbar Najemuddin S.IP, M.Si.,** karena telah menjadi mentor dalam segala hal dalam berkehidupan di **SOSPOL.** Begitu banyak

ilmu dan hal-hal baik lainnya yang diajarkan kepada adik-adiknya yang keras kepala apalagi Dewang, dan untuk itu terima kasih sebesar-besarnya. Semoga segala urusan politiknya dilancarkan dan menjadi konsultan politik yang ber-integritas. Semoga juga hal-hal anehnya dikurangi-kurangi sedikit.

14. Kepada **Tim 11 DPRD KAB. BANTAENG** semoga langkah dan segala harapan kita di 2024 dalam menggapai hal-hal baik selanjutnya selalu diberikan jalan seluas-luasnya. Mari berjuang dan berpolitik yang seharusnya. Masakan **Dg. Haya** selalu mengiringi usaha-usaha baik kita.
15. Kepada keluarga besar **BLUEPLUM RECORDS, Iccang, Venike, Mba Aldi, dan Fadli Bols**, karena telah kebersamai dalam lingkungan kerja yang keren parah (meskipun pasif) dan saling mendukung dalam menghadapi dan menjalani dunia per-skenaan musik makassar. Semoga kesuksesan berada diakhir langkah kita dalam karya yang abadi. Semangatko anak" bikin materi biar bisa rilis lagu lagi, khususnya PLUM. karena setahun banget nda rilis lagu om.
15. Terima kasih kepada **Mario, Appang, dan Rahmet Bimbi** yang selalu kebersamai meskipun lebih banyak pattolnya dikehidupan kampus yang menyebalkan ini. Semoga kita menjadi baik dan tidak menjadi lelaki yang penakut, karena Appang harus bisa bertumbuh

dewasa tanpa harus takut kayak IDGITAF. Kenapa Appang selalu dikanan? karena She's left !!.

16. Kepada **ANDI AISYAH MUJAHIDAH ACHMAD**, terima kasih banyak karena selalu menjadi penolong dalam situasi apapun dan menjadi tempat berkeluh kesah selama perkuliahan biarpun seringko jallo dan tantrum. Meskipun sekarang jarang untuk bersua, tetapi selalu ku doakan segala hal yang baik untuk mu di *stage* kehidupan mu selanjutnya fren.
17. Kepada Keluarga **Pottik** di Luwu Utara karena telah menampung saya selama Covid-19 2020 dalam pelarian saya dari penatnya Kota Makassar. Semoga sehat-sehat ki.
18. Teman-teman **POSKO HAIKAL KASUR KKNT-109 PENDAMPINGAN UMKM KAB. BANTAENG**, karena telah menghadirkan warna baru dalam dunia x. perkuliahan. Dan juga keluarga besar Bapak **BAHAR** dan Ibu **FARIDA**, yang telah menerima kami dengan baik di Bantaeng. Semoga keselamatan mengiringi langkah kita semua.
19. Kepada **Gadis manis alumni melayu**, Terima kasih telah mengukir kisah dan menjadi warna yang paling terang dari semua warna yang ada. Semua hal yang pernah terjadi terekam baik dalam ingatan. Semoga dilancarkan semua perihal masa depannya.

20. Terima kasih sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri, **MUH. FARIQ AKBAR** dan **PLUM.** yang pada hari ini tak pernah lelah berjuang untuk tetap menjaga asa dan tak pernah menyerah dalam menghadapi segala permasalahan dunia yang terkadang tidak masuk akal. Semoga nama kita abadi dalam hal-hal baik yang "pernah" dan "akan" kita lakukan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas tulisan ini.

Makassar, 17 Januari 2024

MUH. FARIQ AKBAR

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PENERIMAAN	III
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	IV
ABSTRAK.....	II
<i>ABSTRACT</i>	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	XIV
DAFTAR TABEL	XVIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.4.1 Secara Akademis	14
1.4.2 Secara Praktis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Konsep Polarisasi Politik.....	20
2.2.1 Polarisasi Afektif.....	22
2.2.2 Polarisasi Ideologis	24
2.3 Kerangka Pikir	26
2.4 Skema Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Tipe dan Dasar Penelitian	29

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian.....	30
3.3 Jenis Data	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.5 Informan Penelitian.....	33
3.6 Teknik Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1 Letak, Luas, dan Batas Wilayah	36
4.2 Sejarah, Demografi dan Kondisi Sosial Masyarakat Kedua Desa	38
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	47
5.1 Polarisasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa	47
5.1.1 Proses Pencalonan Kepala Desa di Kedua Desa	49
5.1.2 Dinamika Kampanye Calon Kepala Desa.....	55
5.1.3 Hasil Pemilihan dan Kondisi Sosial Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa	64
5.2 Polarisasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa.....	70
5.2.1 Kondisi Badan Internal Desa Pasca Pilkadaes	71
5.2.2 Pengaruh Polarisasi Dalam Pengambilan Kebijakan Desa.....	75
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	83
6.1 Kesimpulan.....	83
6.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	95

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi 1. Wawancara bersama Kepala Desa Kalotok (Bpk. Drs. Jusman, 20 Juni 2023).....	95
Dokumentasi 2. Wawancara bersama Warga Desa Kalotok (Bpk. Alexander Empra, 19 Juni 2023)	96
Dokumentasi 3. Wawancara bersama Tokoh Masyarakat Etnis Toraja Desa Kalotok (Bpk. Waris Japin, 18 Juni 2023)	97
Dokumentasi 4. Wawancara bersama Tokoh Masyarakat Etnis Luwu Desa Kalotok (Bpk. Hamrul, 20 Juni 2023)	98
Dokumentasi 5. Wawancara bersama Warga Desa Kalotok (Bpk. Haswil, 20 Juni 2023)	99
Dokumentasi 6. Wawancara bersama Warga Desa Kalotok (Ibu. Idayati, 21 Juni 2023).....	100
Dokumentasi 7. Wawancara bersama Warga Desa Kalotok (Sulhijar, 19 Juni 2023)	101
Dokumentasi 8. Wawancara bersama Warga Desa Kalotok (Syamsir, 18 Juni 2023)	102
Dokumentasi 9. Wawancara bersama Kepala Desa Tulung Sari (Bpk. Sugiarto, 26 Juni 2023)	103
Dokumentasi 10. Wawancara bersama Tokoh Masyarakat Etnis Jawa Desa Tulung Sari (Bpk. Edi Pranowo, 27 Juni 2023)	104
Dokumentasi 11. Wawancara bersama Tokoh Masyarakat Etnis Luwu Desa Tulung Sari (Bpk. Budi, 28 Juni 2023)	105

Dokumentasi 12. Wawancara bersama Warga Desa Tulung Sari (Bpk. Poniman, 25 Juni 2023)	106
Dokumentasi 13. Wawancara bersama Warga Desa Tulung Sari (Bpk. Mukhlisin, 27 Juni 2023)	107
Dokumentasi 14. Wawancara bersama Warga Desa Tulung Sari (Dewi, 26 Juni 2023)	108

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	40
Tabel 3.2	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Polarisasi politik adalah keterbelahan masyarakat dalam menyikapi isu-isu politik. Umumnya terjadi karena perubahan sosio-kultural dalam masyarakat dan munculnya elite-elite politik baru yang memanfaatkan perubahan itu. Perbedaan dalam masyarakat adalah sesuatu yang wajar dan mestinya tak perlu dicemaskan. Demokrasi menampung perbedaan itu serta menyalurkannya dalam bentuk partai politik dan organisasi masyarakat. Sikap partisan atau keberpihakan kepada partai tidak dianggap sebagai hal yang negatif. Sebaliknya, ia adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Polarisasi berbeda dari keberpihakan politik atau partisan, Partisan adalah sikap dalam mendukung suatu partai, terlepas apakah sikap itu muncul karena perbedaan pandangan yang tajam (polarisasi) atau karena sebab lain.¹ Adapun polarisasi adalah perbedaan dalam menyikapi isu-isu fundamental. Partisan umumnya dianggap sebagai sikap yang wajar dan penting dalam demokrasi, sedangkan polarisasi dinilai sebagai sesuatu yang kurang sehat. Bahkan belakangan, istilah ini sering disebut senapas dengan hal-hal yang negatif, seperti konflik, ketegangan, dan intoleransi. Polarisasi yang parah atau “merusak” sebagai suatu proses di mana multiplisitas perbedaan

¹ Nolan McCarty, *Polarization: What Everyone Needs To Know*, (New York: Oxford University Press, 2019) 12.

yang normal dalam masyarakat semakin selaras dalam satu dimensi, perbedaan lintas sektoral menjadi semakin kuat, dan orang-orang semakin memahami dan menggambarkan politik dan masyarakat dalam kaitannya dengan "kita" versus "mereka".²

Di Indonesia sendiri polarisasi politik mengalami peningkatan yang signifikan setelah mengalami kondisi stabil pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009). Namun, sejak 2014, Indonesia menjadi lebih terpolarisasi secara politik. Tiga pemilihan besar telah membuat negara ini lebih terpecah daripada dalam beberapa dekade: pemilihan presiden 2014, pemilihan gubernur 2017 di Jakarta, dan pemilihan presiden 2019. Persaingan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan lawannya, Prabowo Subianto, memicu perpecahan politik yang sebelumnya laten antara Islamis dan pluralis.³ Pembelahan Islam - pluralis Indonesia memiliki akar yang dalam. Bahkan sebelum kemerdekaan pada tahun 1945, gerakan politik dimobilisasi disisi yang berlawanan dari perpecahan ini. Para pendukung politik Islam menginginkan peran yang lebih besar dan lebih formal untuk Islam, sedangkan pluralis mendukung negara sekuler yang lebih, meskipun tidak sepenuhnya dengan hukum dan institusi untuk melindungi banyak minoritas agama di negara itu. Para pemimpin pluralis menang, dan

² Murat Somer, Jennifer McCoy, "Déjà Vu? Polarization and Endangered Democracies in the 21st Century," *American Behavioral Scientist* 62, no. 1 (2018): 2.

³ Edward Aspinall, Marcus Mietzner, "Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections Amidst Rising Illiberalism," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 5, no. 3 (2019): 295–317.

dengan demikian konstitusi Indonesia tidak mengacu pada Islam tetapi sebaliknya menguraikan "kepercayaan pada satu Tuhan" sebagai salah satu dari lima prinsip dasar bangsa, yang bersama-sama dikenal sebagai Pancasila.⁴ Namun, pergesekan dan polarisasi antara dua aliran besar di Indonesia terus berlanjut dan membesar pada tahun-tahun setelah berakhirnya masa pemerintahan SBY yang mengakhiri warisan otoritarian serta transisi presidensial yang dimana ia merupakan presiden pertama yang dipilih oleh rakyat Indonesia melalui pemilu yang pada masa kepemimpinannya, SBY cenderung hati-hati dan tidak mau banyak mengambil resiko atas gesekan - gesekan antara kelompok islam - pluralis, sehingga minim terjadinya polarisasi dan menciptakan kondisi yang stabil. Pemilihan presiden 2014 (Joko Widodo - Prabowo Subianto), Pemilihan Gubernur 2017 di Jakarta (Basuki Tjahaja Purnama), Pemilihan Presiden 2019 (Joko Widodo - Prabowo Subianto) yang secara keseluruhan ketiga proses elektoral di Indonesia tersebut menjadi momentum utama terhadap babak baru polarisasi politik, pemanfaatan isu fundamental dalam prosesnya memecah masyarakat menjadi dua kutub yang saling menjauh. Para kontestan menguatkan identitas serta alirannya dan membangun koalisi sebagai strategi dengan tujuan untuk memenangkan serta menarik masyarakat dan menjatuhkan lawan nya.

⁴ Eve Warburton, "Deepening Polarization and Democratic Decline In Indonesia," Carnegie Endowment for International Peace, (2020): 26.

Isu rasial dan agama menjadi bahan bakar utama dalam terjadinya polarisasi politik di Indonesia belakangan ini.

Kajian polarisasi politik di Indonesia hingga saat ini sangat berperan besar dalam melihat bagaimana polarisasi yang terjadi di Indonesia, ditengah kelangkaan tulisan yang membahas topik polarisasi politik, analisis yang dilakukan oleh Slater dan Arugay dalam artikelnya yang berjudul "Polarizing Figures: Executive Power and Institutional Conflict in Asian Democracies" melihat polarisasi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh pengelolaan kekuasaan dan desain sistem politik, sedangkan analisis yang dilakukan oleh Eve Warburton dalam artikelnya yang berjudul "Deepening Polarization and Demoratic Decline In Indonesia" melihat polarisasi yang terjadi di Indonesia berdasarkan gesekan Identitas melalui proses elektoral, menjadi gagasan yang sangat penting untuk mendalami polarisasi politik yang terjadi di Indonesia, lebih jauh lagi, kajian polarisasi politik di Indonesia hingga saat ini hanya berfokus pada politik makro saja.

Di Indonesia, sejak jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998 yang otoriter, Indonesia telah mulai berusaha melakukan proses demokratisasi hingga pada lingkup terkecil, yaitu lingkup desa. Setelah disahkan nya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang mengakui desa sebagai subyek dalam payung asas rekognisi dan subsidiaritas. Pilihan frase tersebut juga dimaksudkan untuk

menunjukkan bahwa desa bukanlah ruang geografi kosong yang berjarak dari sosio-budaya manusia yang tinggal didalamnya. Sebaliknya, desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya beserta tradisi dan adat - istiadat yang menggerakkan kehidupan itu; sebagai bentuk pengakuan hak-hak tradisional masyarakat desa. Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara mandiri juga menjadi ruang publik politik bagi warga desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara mandiri.

Proses demokratisasi desa juga turut menghadirkan instrumen - instrumen demokrasi, seperti pemilihan kepala desa dan tata kelola pemerintahan desa. Di satu sisi, ini merupakan sebuah langkah yang baik dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola wilayah dan masyarakatnya secara mandiri, meningkatkan upaya pemerintah desa dalam membangun desa dalam berbagai aspek. Namun disisi yang lain, instrumen demokrasi tersebut juga dapat menjadi penyebab munculnya polarisasi politik pada tingkat desa. Jika kita melihat pada kondisi masyarakat desa transmigran yang memiliki heterogenitas masyarakat yang tinggi, perbedaan agama dan etnis menjadi hal yang tidak terhindarkan dan dapat bergesekan satu sama lain serta memunculkan jarak sosial dimasyarakat ketika proses dari instrumen demokrasi desa itu berjalan. Pemilihan kepala desa sebagai salah satu proses untuk

menyaring elit pemerintahan secara jujur, adil, dan bebas, tapi disisi lain merupakan cara untuk menyalurkan suara mayoritas mengalahkan suara minoritas, yang hal ini seringkali meningkatkan ketegangan dan jarak sosial dimasyarakat. Bahkan beberapa kasus bahkan berlanjut kepada polarisasi berkepanjangan.⁵

Demokrasi di Indonesia yang telah memasuki babak baru yang telah banyak memunculkan polarisasi dimasyarakat menjadi landasan fenomena untuk melihat arah penelitian ini, sebab proses demokrasi yang telah menyeluruh sampai pada lingkup mikro yaitu desa, dan gagasan Eve Warburton terhadap masyarakat indonesia yang rentan mengalami proses gesekan identitas dalam proses elektoral yang menyebabkan polarisasi dimasyarakat, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat multikultural khususnya Desa Transmigran yang memiliki intensitas sosial yang tinggi karena hanya terfokus dalam suatu lingkup yang kecil. Desa Transmigran sendiri merupakan sebuah desa yang memiliki ciri masyarakat yang beragam, khususnya dalam konteks etnis. Multikulturalisme atau etnisitas merupakan kelompok manusia yang mempunyai kesamaan dalam hal kebudayaan dan biologis serta bertindak sesuai dengan pola pemikiran yang sama. Terdapat kelompok mayoritas ketika suatu etnik tertentu menempati wilayah yang menjadi asal dari etnik itu dan dapat dikatakan minoritas ketika kelompok tersebut

⁵ Soderborg, Seth, and Burhanuddin Muhtadi. 2021. "Resentment and Polarization in Indonesia." *SSRN Electronic Journal*.

menempati daerah perantau atau daerah pendatang yang telah bercampur dengan etnik lain yang telah menetap lama. Kajian tentang etnik sebagai sekelompok manusia yang mempunyai kebudayaan sama, berkembang dari ranah biologis menuju ranah kebudayaan dan akhirnya bermuara pada ranah politik. Di dalam lingkup wilayah yang multi-etnik akan terjadi pola hubungan etnik ketika saling kontak atau berinteraksi.

Etnisitas merupakan fenomena tersendiri yang muncul dalam interaksi sosial. Etnisitas juga beraneka ragam, tergantung pada jenis hubungan yang saling mempengaruhi antara individu dan kelompok dengan lingkungan sosial maupun alam mereka.⁶ Lebih lanjut, Menurut Narrol kelompok etnik dikenal sebagai populasi yang mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.⁷ Pola hubungan antar kelompok masyarakat etnis dalam suatu lingkup yang sama memiliki dampak positif dan negatif, berdampak positif ketika masyarakat dari kedua kelompok berbeda mampu untuk mengintegrasikan perbedaan mereka kedalam hubungan yang harmonis, sedangkan berdampak negatif, ketika kedua

⁶ Liliweri Alo, *"Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya"*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), 9.

⁷ *ibid.*

kelompok masyarakat menganggap suatu perbedaan adalah sebuah masalah.

Namun, akhir-akhir ini banyak studi yang menunjukkan bahwa adanya peningkatan konflik di masyarakat dalam politik lokal, salah satu temuan Muhtar Haboddin melalui artikelnya menunjukkan rentannya konflik yang terjadi di masyarakat multikultur dalam politik lokal dengan sentimen etnis dan agama. Politik etnisitas digunakan untuk mempersoalkan antara, “kami” dan “mereka”, “saya” dan “kamu” sampai pada bentuknya yang ekstrim “jawa” dan “luar jawa” atau “islam” dan “Kristen”. Dikotomi oposisional semacam ini sengaja dibangun oleh elit politik lokal untuk menghantam musuh ataupun rival politiknya yang notabene “kaum pendatang”.⁸

Kabupaten Luwu Utara yang merupakan sebuah Kabupaten di Sulawesi Selatan yang terbilang memiliki luas yang sangat besar, yang merupakan daerah asal masyarakat etnis Luwu. Secara historis, Luwu adalah suku bangsa yang besar yang terdiri dari 12 anak suku. Walaupun orang sering mengatakan bahwa Luwu termasuk suku Bugis, tetapi orang-orang Luwu itu sendiri menyatakan mereka bukan suku Bugis dan sangat sensitif terhadap pernyataan itu, Sesuai dengan pemberitaan lontara Pammana yang mengisahkan pembentukan suku Ugi’ (Bugis) di daerah Cina Rilau dan Cina Riaja, yang keduanya disebut pula Tana Ugi’

⁸ Muhtar Haboddin, “Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal”, *Jurnal Studi Pemerintahan Universitas Barawijaya*, (2007), 111.

ialah orang-orang Luwu yang bermigrasi ke daerah yang sekarang disebut Tana Bone dan Tana Wajo dan membentuk sebuah kerajaan. Mereka menamakan dirinya Ugi' yang diambil dari akhir kata nama rajanya bernama La Sattumpugi yang merupakan sepupu dua kali dari Sawerigading dan juga suami dari We Tenriabeng, saudara kembar dari Sawerigading.⁹ Bahkan secara ciri kebudayaan, masyarakat Luwu dengan Bugis memiliki ciri yang sangat berbeda, mulai dari adat-istiadat dimasyarakatnya hingga bahasa yang digunakan, memperlihatkan bahwa mereka adalah kelompok yang berbeda. Karena kondisi wilayahnya yang cukup luas dan masih memiliki banyak kosong serta dengan segala potensial sumber daya alamnya, menjadikan Kabupaten Luwu Utara sebagai sebuah daerah yang ideal untuk menjadi tempat para pendatang dari berbagai daerah baik dari lokal (satu pulau) maupun secara nasional untuk menetap mencari peluang hidup.

Masyarakat ber-transmigrasi melalui atas kemauan sendiri maupun atas kebijakan pemerintah. Masyarakat yang dominan berprofesi sebagai petani dan nelayan menjadi daya tarik bagi masyarakat dari luar daerah untuk mengolah sumber daya yang tersedia, etnis Toraja sebagai salah satu etnis lokal di Sulawesi Selatan juga banyak melakukan migrasi ke daerah - daerah yang ada di Kabupaten Luwu Utara untuk tinggal menetap dan mencari kehidupan. Namun, persebaran etnis yang ada bukan cuman berasal dari transmigran lokal Sulawesi Selatan saja, juga

⁹ "MUBES V KERUKUNAN KELUARGA LUWU RAYA". Diakses tanggal 4 mei 2023.

termasuk transmigran nasional. Secara historis, Kabupaten Luwu Utara (Kabupaten Luwu sebelum pemekaran pada tahun 1999) juga menjadi daerah sasaran alokasi dari kebijakan transmigrasi nasional sejak dulu dan berlanjut hingga program pembangunan lima tahun (PELITA) pada masa orde baru yang fokus pada penyebaran penduduk dari Pulau Jawa dan sekitarnya ke pulau lain di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Utara yang didominasi oleh etnis Jawa dan Bali. Selain itu, juga dilaksanakan pembangunan pedesaan di lokasi tujuan transmigrasi.¹⁰ Dalam hal ini, ada dua jenis persebaran yang terjadi di desa di Luwu Utara, pertama persebaran etnis toraja yang bersifat lokal (satu pulau) dan bermigrasi tanpa tendensi dari kebijakan pemerintah dan kedua, persebaran etnis Jawa yang bersifat nasional dan memiliki tendensi dari kebijakan pemerintah. Proses dua persebaran dengan latar belakang yang berbeda tadi tentunya juga berpengaruh terhadap penerimaan dan pandangan masyarakat etnis Luwu terhadap etnis pendatang tersebut khususnya di desa yang menjadi para transmigran yaitu Desa Kalotok dan Desa Tulung Sari.

Di Desa Kalotok sendiri, merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sabbang Selatan, jika melihat sejarah, Desa Kalotok merupakan sebuah desa yang memiliki cerita yang sangat mendalam

¹⁰ Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi. (2015). Transmigrasi Masa Doeloe, Kini, dan Harapan ke Depan. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

sebagai sebuah wilayah yang ditempati oleh masyarakat asli setempat yaitu masyarakat Luwu dan memiliki akar kebudayaan Luwu yang kuat, Luas wilayah desa yang tergolong cukup luas dan masih banyak didominasi oleh hutan membuat masyarakat dari daerah lain untuk datang dan mencari kehidupan, khususnya masyarakat etnis Toraja yang kebanyakan datang dan menetap untuk mengolah dan membuka lahan di Desa Kalotok dalam sektor pertanian. Hingga saat ini, masyarakat etnis Toraja yang merupakan etnis pendatang telah lama menjadi bagian dari Desa Kalotok. Desa Kalotok yang awalnya hanya di huni oleh masyarakat asli setempat, setelah kedatangan masyarakat etnis Toraja menghadirkan identitas baru mempengaruhi segala aspek masyarakat di desa, khususnya dalam aspek sosial dan politik desa, yang memunculkan dinamika baru dalam prosesnya. Dalam pemilihan kepala desa yang terakhir dilaksanakan di Desa Kalotok pada tahun 2018, dimenangkan oleh calon Drs. Jusman melawan dua calon lainnya, yang ketiga nya merupakan etnis Luwu, mengindikasikan bagaimana dominasi masyarakat penduduk asli terhadap kelompok minoritas di desa tersebut. Suara mayoritas dan suara minoritas kerap kali menyebabkan terjadinya pergesekan antar kelompok melalui sentimen etnis dan agama.

Sedangkan di Desa Tulung Sari, merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Secara historis, Kecamatan Sukamaju memang merupakan sebuah kecamatan yang dibentuk khusus untuk menjadi wilayah tujuan transmigran. Program

pemerintah dalam melakukan penyebaran penduduk di wilayah yang padat salah satunya Pulau Jawa menuju wilayah yang tidak padat yaitu Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Utara. Melalui kebijakan transmigrasi, masyarakat etnis Jawa datang ke wilayah Kabupaten Luwu Utara untuk tinggal menetap dan mencari kehidupan baru. Desa Tulung Sari sebagai sebagai salah satu desa di Kecamatan Sukamaju yang dibentuk untuk menjadi desa Transmigran, mayoritas penduduknya merupakan masyarakat etnis Jawa. Namun, karena wilayah nya yang berada di Kabupaten Luwu Utara, membuat masyarakat etnis Luwu juga ikut bermukim di Desa tersebut dan menghasilkan dinamika sosial antar kelompok etnis. Dalam konteks politik, pemilihan kepala desa terakhir yang terjadi di Desa Tulung Sari pada tahun 2022 dimenangkan oleh Sugiarto yang merupakan etnis Jawa mengalahkan Syamsul Bahri sebagai petahana yang merupakan etnis Luwu, menghadirkan dinamika yang lebih intens karena melalui kontestasi antara dua kelompok masyarakat dan rentan terhadap polarisasi melalui gesekan identitas.

Studi ini hadir untuk melihat polarisasi yang terjadi jauh kedalam lingkup yang terkecil, yaitu Desa melalui setiap proses demokratisasi. Studi-studi tentang kajian polarisasi politik di Indonesia yang hingga saat ini hanya berfokus pada politik nasional, meninggalkan celah besar dalam melihat polarisasi dalam lingkup yang paling kecil, terlebih lagi dalam konteks desa yang multikultural, khususnya Desa Transmigran. Dengan keberagaman etnis dan agama yang ada dalam kehidupan

bermasyarakat desa di Kabupaten Luwu Utara yang secara langsung meningkatkan konsentrasi heterogenitas sosial yang diakibatkan menyatunya etnis pendatang dan etnis setempat dalam satu desa, dan rentan terhadap polarisasi politik dalam praktik demokrasi dilingkup tersebut. Penelitian ini hadir untuk membandingkan dinamika terbentuknya polarisasi politik di kedua desa yang memiliki latar belakang sejarah dan masyarakat berbeda, untuk mengetahui lebih detail tentang karakteristik polarisasi yang terjadi. Selanjutnya, penelitian ini juga menelusuri bagaimana polarisasi pasca pilkades mempengaruhi tata kelola pemerintahan desa (*Governance*) melalui pengambilan kebijakan pemerintah desa. Melihat lebih jauh polarisasi politik yang terjadi di dua desa transmigran pada pemilihan kepala desa dan berlanjut dalam tata kelola pemerintahan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian yang telah disampaikan diatas dan berdasarkan latar belakang masalah dan luasnya cakupan judul, maka penulis membatasi dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana polarisasi politik masyarakat di dua desa transmigran Kabupaten Luwu Utara dalam pemilihan kepala desa ?
2. Bagaimana polarisasi politik mempengaruhi tata kelola pemerintah desa di dua desa tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui perbandingan karakteristik polarisasi politik yang terjadi di masyarakat kedua desa di Kabupaten Luwu Utara dalam proses elektoral desa.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh polarisasi politik terhadap tata kelola pemerintah desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Akademis

Secara akademis, penelitian ini berguna sebagai bahan referensi peneliti lain yang juga mengambil tema tentang polarisasi politik dan memperluas ilmu mengenai sesuai dengan cakupan penelitian, dan juga diharapkan untuk mengembangkan pemikiran penulis itu sendiri tentang bagaimana dinamika politik desa di Indonesia.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan referensi bagi para pembaca untuk mengetahui bagaimana polarisasi politik yang terjadi di lingkup politik desa yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa orang sebelumnya. Kemudian dalam bab ini juga akan membahas tentang teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan peneliti jawab melalui penelitian ini.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu acuan peneliti untuk membandingkan peneliti dengan hasil peneliti yang pernah diteliti oleh peneliti terdahulu, Penelitian terdahulu menjelaskan tentang beberapa hasil penelitian sebelumnya namun memiliki kesamaan dengan tema dibahas oleh peneliti. Berikut merupakan penelitian- penelitian yang terkait dengan judul penulis sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eve Warburton, yang berjudul "Deepening Polarization and Democratic Decline In Indonesia,". Adapun hasil dari penelitian ini adalah konflik pemilu 2014, 2017, dan 2019 di Indonesia yang terpolarisasi telah berkontribusi pada penurunan kualitas demokrasi

Indonesia yang nyata. Selain itu, banyak orang Indonesia prihatin dengan kerusakan yang dilakukan oleh kampanye politik eksklusif dan polarisasi baru-baru ini terhadap tatanan sosial negara. Sejak 2014, seruan kaum Islamis dan kampanye kotor telah menjadi fitur yang lebih menonjol dari wacana pemilu Indonesia. Kampanye semacam itu dapat mengubah opini publik dan menciptakan irisan baru antara kelompok masyarakat yang berbeda. Tingkat polarisasi masyarakat sulit dipelajari, dan data tentang Indonesia masih terbatas. Namun, bukti yang berkembang menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia memang merasa mereka hidup dalam lanskap politik yang lebih terpecah, dan perpecahan tersebut menembus hubungan sosial di luar musim pemilihan.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dan Slater dan Aries Arugay dengan judul "Polarizing Figures: Executive Power and Institutional Conflict in Asian Democracies". Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan polarisasi demokrasi tidak dapat dihindari atau diberantas. Tidak mungkin untuk memberantas karena mereka yang paling kuat membela kendala demokrasi biasanya ditempatkan di lembaga yang berbeda dari mereka

¹¹ Eve Warburton, "Deepening Polarization and Democratic Decline In Indonesia," Carnegie Endowment for International Peace, (2020): 35.

yang memprioritaskan inklusivitas demokrasi. polarisasi demokratis tidak dapat dihindari karena tindakan agen diperlukan untuk memulainya dan cukup untuk mengakhirinya. Ketika kepala eksekutif hanya bermain sesuai aturan, mereka membuat polarisasi lebih kecil kemungkinannya. Dan ketika mereka menyalahgunakan kekuatan mereka, lawan mereka juga dapat menjaga polarisasi agar tidak merusak dengan bermain sesuai aturan dalam proses menyingkirkannya. Kuncinya adalah bagi para penentang tokoh-tokoh polarisasi untuk memusatkan kemarahan mereka pada orang yang menyalahgunakan kekuasaannya, dan bukan pada banyak orang yang dia klaim menggunakannya.¹²

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Iqbal Ahnaf dan Danielle N. Lussier dengan judul "Religious Leaders and Elections in the Polarizing Context of Indonesia". Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pemimpin agama juga memainkan peran kunci dalam mempromosikan toleransi dan menolak daya tarik sektarianisme, ini didasarkan pada analisis khotbah di rumah ibadah selama masa kampanye. Bahkan data terbatas pada khotbah di sholat Jumat dan

¹² Dan Slater, Aries Arugay, "Polarizing Figures: Executive Power and Institutional Conflict in Asian Democracies," *American Behavioral Scientist*, (2018): 105.

kebaktian Minggu, itu menggambarkan gambaran umum tentang tidak adanya mobilisasi sektarian selama pemilihan. Dalam banyak kasus meningkatnya sektarianisme selama pemilihan di daerah lain, para pemimpin agama dan rumah ibadah telah memainkan peran sentral dalam mobilisasi kampanye sektarian. Konteks politik yang lebih luas di Yogyakarta, yang memprioritaskan budaya harmoni dan pemerintahan hegemonik Sultan di bawah status khusus wilayah tersebut dapat menjelaskan kurangnya kekerasan yang dimobilisasi selama pemilihan. Budaya dominan dan hegemonik ini dapat membuat sektarianisme dalam retorika politik menjadi kontraproduktif. Untuk alasan ini, aktor politik mungkin telah menolak tren mengintensifkan kekerasan agar sesuai dengan budaya dominan.¹³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Seth Soderborg dan Burhanuddin Muhtadi yang berjudul "Resentment and Polarization in Indonesia". Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Polarisasi partisan di Indonesia kemungkinan akan terus berlanjut, bahkan jika tokoh-tokoh politik tertentu yang terkait dengan hak politik selaras dengan partai meninggalkan sikap oposisi mereka, kecuali kebencian

¹³ M. Iqbal Ahnaf, Danielle N. Lussier, "Religious Leaders and Elections in the Polarizing Context of Indonesia," *Humaniora* 31, no. 3 (2019): 238.

ini berhasil ditekan, seperti yang dilakukan pemerintah dengan kekerasan dalam kasus kelompok-kelompok yang kita temukan terkait paling kuat dengan kebencian agama. Meningkatnya kebencian anti-Tionghoa, regional, dan agama di antara kelompok termuda dari orang dewasa usia pemilih adalah tanda bahwa mereka yang beranjak dewasa di lingkungan Indonesia yang sangat terpolarisasi akan melakukan politik kebencian. Berkat kekuatan kebencian, polarisasi akan tetap ada.¹⁴

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhtar Haboddin, yang berjudul "Politik Etnis", dengan fokus penelitian wacana mengenai politik etnis kembali menguat semenjak reformasi di negeri ini digulirkan. Hal ini seiring dengan kebijakan desentralisasi politik yang dijalankan oleh pemerintah. Era reformasi telah menghantarkan bangsa ini ke arah keterbukaan, demokratisasi, otonomi daerah dan desentralisasi ternyata telah melahirkan kembali dan memperkuat kesadaran etnis. Gerakan politik etnisitas ini semakin jelas wujudnya. Bahkan banyak aktor politik lokal maupun nasional secara sadar menggunakan isu ini dalam power-sharing. Praktik politik etnis secara nyata menunjukkan

¹⁴ Seth Soderborg, Burhanuddin Muhtadi, "Resentment and Polarization in Indonesia," SSRN Electronic Journal, (2021): 39-40.

bahwa betapa ampuhnya isu ini digunakan oleh aktoraktor politik, ketika berhadapan dengan entitas politik lain.¹⁵

Dari keempat penelitian tersebut memiliki relevansi yang terkait dengan penelitian ini yang secara umum menjelaskan terkait bagaimana polarisasi politik yang terjadi terkhususnya di Indonesia dan dinamika politik lokal. Adapun dari keempat penelitian diatas menjadi rujukan penulis untuk menyusun dan melakukan penelitian ini.

2.2 Konsep Polarisasi Politik

Polarisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pembagian atas dua bagian (kelompok orang yang berkepentingan dan sebagainya) yang berlawanan. Definisi polarisasi berasal dari "polaritas", yaitu suatu keadaan yang memiliki dua kecenderungan, pendapat, dan aspek yang berlawanan atau kontradiktif.¹⁶ Dalam konteks politik sendiri, polarisasi adalah pemecahan kelompok yang memiliki pemahaman dan pandangan politik yang berbeda, polarisasi politik terjadi ketika "kumpulan populasi mengadopsi sikap yang semakin berbeda terhadap partai dan anggota partai (polarisasi

¹⁵ Muhtar Haboddin, "Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal", *Jurnal Studi Pemerintahan Universitas Barawijaya*, (2007), h. 111.

¹⁶ Nolan McCarty, *Polarization : What Everyone Needs To Know*, (New York: Oxford University Press, 2019) 18.

afektif), dan ideologi (ideologis).¹⁷ Sederhananya polarisasi politik dapat diartikan sebagai sebuah batas atau jurang pemisah antara kutub politik yang dimana polarisasi menarik masyarakat atau pemilih ke dua arah yang berbeda dan meninggalkan celah yang besar ditengahnya. Polarisasi politik sendiri bisa disebabkan oleh partai, seperti yang terjadi di Amerika bahwa polarisasi politik adalah sebagai kesenjangan yang besar antara kaum Republik dan Demokrat. Kemudian karena ideologi, seperti yang terjadi di Hungaria, dimana blok "Kiri" dan "Kanan" menentang satu sama lain dalam perjuangan, dimana pihak yang kalah sama sekali ditolak pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan.¹⁸ Kemudian bisa juga disebabkan oleh tokoh atau elite dan ini semakin dimungkinkan. dengan adanya populisme, yang dimana masyarakat yang telah dimobilisasi kepentingannya dihadapkan dengan elit. Di Indonesia sendiri, polarisasi politik yang terjadi merupakan contoh dari polarisasi afektif.

¹⁷ Gordon Heltzel, Kristin Laurin, "Polarization in America: two possible futures," *Current Opinion in Behavioral Sciences* 34, (2020): 179–184.

¹⁸ Federico Vegetti, "The Political Nature of Ideological Polarization: The Case of Hungary," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 681, no. 1 (2019): 78.

2.2.1 Polarisasi Afektif

Polarisasi afektif mengacu pada fenomena di mana perasaan dan emosi individu terhadap anggota partai atau kelompok politik mereka sendiri menjadi lebih positif, sementara perasaan mereka terhadap anggota partai atau kelompok lawan menjadi lebih negatif. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya permusuhan dan kurangnya kemauan untuk berkompromi atau bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki pandangan politik berbeda. Fenomena ini dapat dilihat baik secara online maupun offline, dan telah meningkat di beberapa negara dalam beberapa tahun terakhir.¹⁹ Lebih lanjut menurut Iyengar, polarisasi afektif mengacu pada ketidaksukaan dan ketidakpercayaan terhadap partisan yang berlawanan diantara anggota pemilih, dioperasionalkan sebagai perbedaan dalam kehangatan yang diperluas ke partisan sendiri sebagai lawan dari co-partisan. Orang-orang menginternalisasi afiliasi partisan mereka sebagai bagian dari perasaan diri mereka dan ingin merasa positif tentang kelompok yang mereka identifikasi, Ini juga disebabkan karena menyatunya identitas politik dan identitas sosial

¹⁹ Boxell, Lewi, Gentzkow, Matius; Shapiro, Jesse M, "Cross-Country Trends in Affective Polarization," *Tinjauan Ekonomi dan Statistik* (2022): 1–60.

lainnya, semakin lama semakin menyatu dan identitas sosial lainnya seperti agama dan suku. Semakin menyatunya identitas politik dan identitas sosial akhirnya menjadi peneguhan terhadap identitas tersebut maka semakin ter-polarisasi juga. Memang benar, dengan menggunakan eksperimen inovatif di 25 negara Eropa, sebuah penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa besarnya polarisasi afektif antar partai jauh lebih kuat dibandingkan dengan perpecahan atas atribut-atribut lain yang membentuk perpecahan tradisional, seperti kelas, agama, dan bahkan kebangsaan, yang menegaskan hal ini. keunggulan "partaiisme" dan generalisasinya di negara-negara demokratis. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa polarisasi afektif di Eropa tidak terutama didorong oleh kebencian kelompok luar, namun penelitian ini menemukan bahwa bias dalam kelompok dan luar kelompok signifikan secara statistik.²⁰

²⁰ Hnn, Hyeonho; Hilpert, David; Konig, Thomas (2023). "Terpisah Kita Bersatu: Sifat Partaiisme dan Peran Kemitraan Koalisi di Eropa". *Ulasan Ilmu Politik Amerika* : 1–19.

2.2.2 Polarisasi Ideologis

Polarisasi Ideologis mengacu sejauh mana para pemilih mempunyai keyakinan yang berbeda mengenai isu-isu ideologis (misalnya, aborsi atau tindakan afirmatif) atau keyakinan yang secara konsisten bersifat konservatif atau liberal dalam berbagai isu (misalnya, memiliki posisi konservatif terhadap aborsi dan tindakan afirmatif).²¹ Penyortiran partisan mengacu pada sejauh mana pemilih "menyortir" atau mengidentifikasi suatu partai berdasarkan ideologi, ras, agama, gender, atau karakteristik demografis lainnya.²² Partai politik atau kelompok yang terpolarisasi bersifat kohesif secara internal, bersatu, terprogram, dan berbeda secara ideologis; mereka biasanya ditemukan dalam sistem pemerintahan demokratis parlementer. Dalam sistem dua partai, badan legislatif yang terpolarisasi memiliki dua karakteristik penting: pertama, terdapat sedikit atau bahkan tidak ada tumpang tindih ideologi antara anggota kedua partai; dan kedua, hampir semua konflik mengenai undang-undang dan kebijakan terpecah dalam perbedaan ideologi yang luas. Hal ini menyebabkan terjadinya

²¹ Abramowitz, Alan I.; Saunders, Kyle L. (2008). "Apakah Polarisasi Sebuah Mitos?". *Jurnal Politik*. 70 (2): 542–555.

²² Mason, Liliana (2015). "Saya Dengan Tidak Hormat Setuju": Efek Berbeda dari Penyortiran Partisan terhadap Polarisasi Sosial dan Isu". *American Journal of Political Science*. 59 (1): 128–145.

penggabungan partai-partai politik dan ideologi (yaitu, Demokrat dan Republik hampir menjadi sinonim yang sempurna untuk liberal dan konservatif) dan runtuhnya pusat ideologi.²³ Namun, dengan menggunakan desain lintas negara yang mencakup 25 negara Eropa, sebuah penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa yang mempengaruhi bukanlah jumlah partai itu sendiri, melainkan cara suatu partai berinteraksi dengan partai lain. besarnya dan sifat polarisasi afektif.²⁴ Sebagian besar kajian mengenai polarisasi ideologis berfokus pada badan legislatif dan deliberatif. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan politik mengukur polarisasi di AS dengan memeriksa peringkat anggota partai yang diterbitkan oleh kelompok-kelompok kepentingan. Namun kini, sebagian besar ilmuwan menganalisis pola pemungutan suara untuk menyelidiki tren dalam pemungutan suara di tingkat partai dan kesatuan partai.²⁵

²³ Ibid.

²⁴ Hahn, Hyeonho; Hilpert, David; König, Thomas (2022). "Dibagi oleh Eropa: polarisasi afektif dalam konteks pemilu Eropa". *Politik Eropa Barat*. 46 (4): 705–731.

²⁵ Fiorina, Morris P.; Abrams, Samuel J. (2008). "Polarisasi Politik di Publik Amerika". *Review Tahunan Ilmu Politik*. 11 (1): 563–588.

2.3 Kerangka Pikir

Fenomena polarisasi politik di negara-negara demokrasi khususnya dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan secara pesat diberbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Penelitian ini hadir melihat polarisasi jauh hingga ke dalam lingkup desa yang tidak terlepas dari proses-proses demokrasi. Dalam konteks politik desa yang dimana isu mayoritas yang terjadi adalah pergesekan identitas dalam proses politiknya. Kehidupan politik masyarakat desa yang sangat kental terhadap nilai-nilai identitas primordial, terlebih lagi pada desa transmigran yang dimana menyatunya berbagai etnis dalam satu wilayah terbatas, tentunya sangat rentan terhadap polarisasi berbasis identitas dalam dinamika politik dilingkup tersebut. Proses demokratisasi desa juga tak terlepas dari instrumen-instrumen desa seperti pemilihan kepala desa dan tata kelola pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa berfungsi untuk menyaring elit secara demokratis, namun kemenangan suara mayoritas dan kekalahan minoritas seringkali meningkatkan jarak sosial dimasyarakat. Kemudian pada aspek tata kelola pemerintahan desa yang merupakan hasil dari proses pemilihan kepala desa, dalam konteks kebijakan desa serta alokasi anggaran juga menjadi fokus perhatian untuk ditelusuri lebih lanjut, sebab hasil kemenangan kepala desa yang didapat

berdasarkan suara kelompok mayoritas, dalam proses pengambilan kebijakannya juga rentan mengalami polarisasi dengan tujuan untuk menjaga basis pendukung yang memiliki kesamaan kepentingan dalam menjalankan kekuasaan dan mengesampingkan kelompok minoritas. Melalui analisis tersebut juga, penulis melihat bagaimana polarisasi politik tidak hanya terbatas pada proses elektoral di desa saja, namun juga memiliki peluang terus berlanjut pada sistem tata kelola pemerintahan desa. Penulis membandingkan dua desa yang memiliki kondisi sosial masyarakat, sejarah desa, demografi, dan politik yang berbeda untuk melihat bagaimana perbedaan dan persamaan yang muncul disetiap dinamika politik yang terjadi di kedua desa dalam membentuk polarisasi dimasyarakat, sehingga mendapatkan penggambaran yang lebih detail terkait hal tersebut.

Pada penelitian ini, guna menjawab rumusan masalah serta tujuan, penulis menggunakan konsep polarisasi politik dengan melihat fenomena melalui polarisasi afektif dan ideologis untuk melihat penyebab terjadinya polarisasi politik dalam lingkup politik desa. Yang dimana penulis memilih itu untuk memudahkan penulis dalam mengetahui dan memahami lebih dalam tentang polarisasi politik di dua desa transmigran di Kabupaten Luwu Utara.

2.4 Skema Kerangka Pikir

